

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merepresentasikan fenomena multidimensional yang kompleks dan senantiasa menjadi permasalahan struktural lintas batas geografis, tidak hanya melilit negara-negara berkembang, tetapi juga menyisakan jejak tantangan tersendiri bagi negara-negara maju dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tingkat dunia, isu kemiskinan masih menjadi fokus utama dalam upaya pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Menurut perkiraan Bank Dunia pada tahun 2022, lebih dari 9 persen penduduk dunia masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, dengan penghasilan harian di bawah US\$2,15. Angka ini menggambarkan bahwasanya meskipun ada kemajuan dalam upaya global untuk mengurangi kemiskinan, sebagian besar masyarakat di berbagai belahan dunia masih berjuang memenuhi kebutuhan hal-hal dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang memiliki penghasilan di bawah ambang minimum dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, air bersih, pendidikan, akses terhadap informasi, serta layanan kesehatan. Akar permasalahan kemiskinan mencakup rendahnya kesempatan kerja yang memadai, akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta konsumsi rumah tangga. Selain itu, ketidakmerataan distribusi kekayaan, konflik, perubahan iklim, dan krisis ekonomi, seperti resesi akibat pandemi COVID-19, semakin memperburuk situasi

masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketika terjadi guncangan ekonomi global, kelompok masyarakat rentan biasanya terdampak lebih parah, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (Anonim, 2020b)

Sebagai negara berkembang dengan populasi yang melebihi 280 juta jiwa, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan dalam beberapa dekade terakhir, lebih dari 9 persen warga Indonesia masih berada di bawah ambang batas kemiskinan yang ditetapkan secara nasional (Anonim, 2023a). Kondisi ini menunjukkan bahwasanya penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu yang mendesak dan memerlukan perhatian serius untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Penanganan kemiskinan memiliki urgensi tinggi dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, karena keberhasilannya tidak sekadar memberikan implikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga pada penguatan stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Eksistensi kemiskinan yang masih membelenggu Indonesia dalam skala signifikan tidak dapat dilepaskan dari konstelasi faktor-faktor struktural yang saling berkelindan, seperti disparitas pendapatan antarkelompok masyarakat, minimnya pemerataan akses terhadap layanan fundamental terutama pendidikan dan Kesehatan serta tingginya angka pengangguran yang secara laten menimpa kelompok rentan, yakni perempuan dan generasi muda, yang sering kali terpinggirkan dalam arus utama pembangunan. Kondisi-kondisi ini menghambat kemampuan masyarakat prasejahtera untuk mencapai kesejahteraan yang lebih

baik. Indonesia memiliki dinamika sosial-ekonomi kompleks, tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai factor makroekonomi dan sosial. Pemerintah berkontribusi dengan melaksanakan beragam inisiatif seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah diluncurkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera. Namun, tantangan geografis seperti ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta pembangunan yang tidak merata antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur menambah kompleksitas upaya penanggulangan kemiskinan (Sumirat, 2019)

Strategi utama yang ditempuh adalah perencanaan pembangunan jangka panjang yang dirancang tidak hanya untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta berorientasi pada kesinambungan jangka panjang. Perencanaan yang baik menjadi dasar bagi perubahan yang signifikan menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera, serta mengarahkan pembangunan ke arah kemajuan yang nyata dan terukur. Peningkatan PDRB atau GDP menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan, karena menggambarkan kemajuan ekonomi sekaligus efektivitas upaya pembangunan yang dilaksanakan.

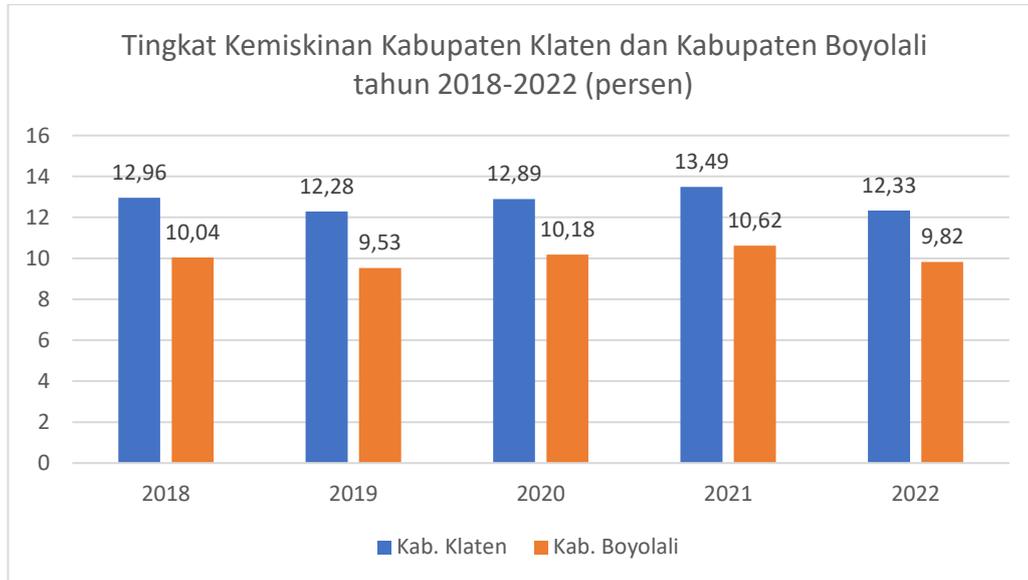
Pasca mengalami kontraksi akibat guncangan pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dinamika perekonomian Kabupaten Klaten mulai menunjukkan geliat pemulihan yang progresif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,82%, membalikkan arah dari sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar -

1,18%. Akselerasi pemulihan ini terutama ditopang oleh performa sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan dan perdagangan, yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut.

Meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan ekonomi, tantangan sosial-ekonomi masih membayangi. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten justru mengalami kenaikan, dari 12,89% pada tahun 2020 menjadi 13,89% pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya pemulihan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya merata dan belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Kemiskinan di Kabupaten Klaten, yang terletak di wilayah Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Boyolali, memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan daerah perkotaan besar di Indonesia. Kabupaten ini didominasi oleh sektor pertanian, masyarakat mengandalkan penghasilan dari usaha pertanian dan sektor informal. Meskipun angka kemiskinan di Klaten secara bertahap mengalami penurunan, tantangan struktural seperti rendahnya produktivitas pertanian, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan di beberapa wilayah pedesaan, serta minimnya kesempatan kerja di sektor formal masih menjadi kendala utama.

**Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali 2018-2022

(Data Diolah)

Selama periode 2018–2022, menurut data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Klaten tercatat lebih tinggi secara konsisten dibandingkan dengan Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan Klaten mencapai 12,96%, sedangkan Boyolali hanya 10,04%. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2022, di mana Klaten mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 12,33%, sementara Boyolali 9,82%. Meskipun keduanya mengalami fluktuasi, Klaten cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021, kemungkinan sebagai dampak pandemi COVID-19, dengan Klaten mencapai 13,49% dan Boyolali 10,62%. Perbedaan ini mencerminkan bahwasanya kondisi ekonomi di Kabupaten Boyolali relatif lebih stabil dan baik dibandingkan dengan Klaten dalam hal kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor seperti perbedaan struktur ekonomi, efektivitas program pengentasan

kemiskinan, serta kualitas infrastruktur dan aksesibilitas wilayah dapat menjadi penyebab kesenjangan tersebut.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Klaten menjadi perhatian serius karena meskipun wilayah ini terletak di kawasan strategis di Jawa Tengah, angka kemiskinan di Klaten secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi. Salah satu penyebab utama kemiskinan di Klaten adalah ketimpangan pendapatan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat yang signifikan. Penelitian oleh Utomo (2022) mengindikasikan bahwasanya kesenjangan pendapatan berdampak terhadap besar terhadap tingkat kemiskinan di Klaten, sementara variabel lain seperti pengangguran dan rasio ketergantungan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor struktural lain yang memperkuat siklus kemiskinan. Maizunati (2018) mengungkapkan bahwasanya proporsi penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar di Klaten berkorelasi langsung dengan tingginya angka kemiskinan, karena rendahnya pendidikan berdampak pada terbatasnya peluang kerja yang layak dan berpenghasilan stabil.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwasanya meskipun berbagai program seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai telah dijalankan, efeknya masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan. Bahkan, studi Mehilda (2020) mencatat peningkatan jumlah dana desa yang dialokasikan belum secara nyata berhasil mengurangi tingkat kemiskinan karena belum difokuskan pada pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Fenomena ini mencerminkan adanya kemiskinan struktural yang sulit diatasi hanya dengan program bantuan sosial jangka pendek. Selain itu, faktor budaya dan pola

pikir masyarakat yang pasif terhadap perubahan juga menjadi penghambat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Situasi tersebut membuat sebagian besar masyarakat miskin terus bertumpu pada sektor informal serta bantuan sosial, di tengah keterbatasan produktivitas dan akses ke layanan dasar.

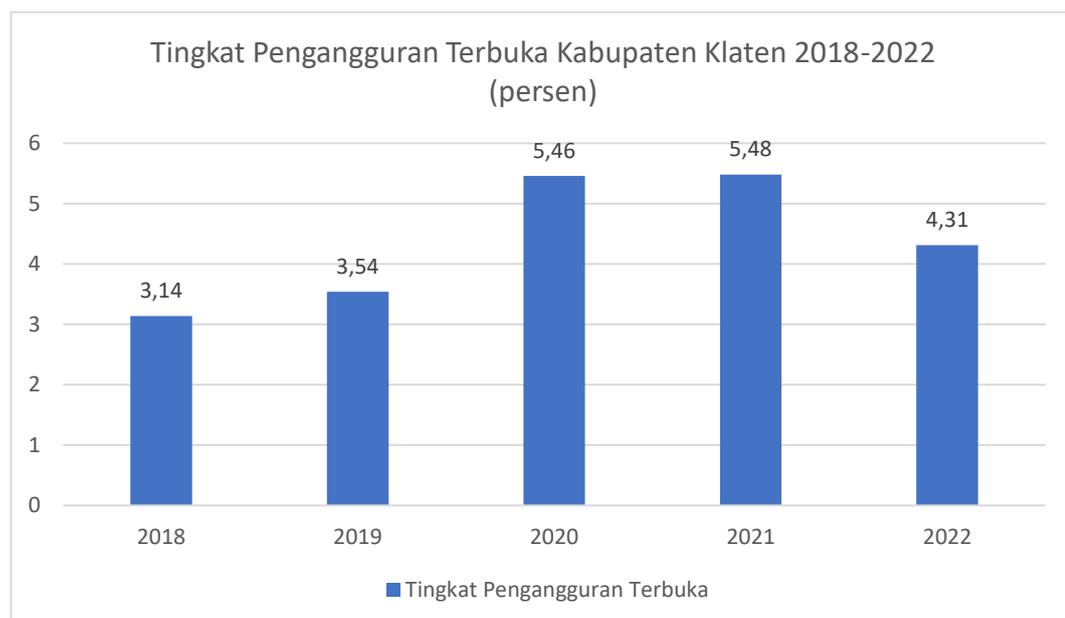
Jika dibandingkan dengan Kabupaten Boyolali, yang secara geografis berdekatan dan memiliki karakteristik sosial ekonomi yang tidak jauh berbeda, Klaten menunjukkan kinerja yang kurang optimal dalam pengentasan kemiskinan. Boyolali berhasil memanfaatkan potensi sektor industri dan ekspor produk kerajinan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga angka kemiskinannya relatif lebih rendah. Keberhasilan Boyolali ini menandakan bahwasanya strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan terarah mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Dengan demikian, Klaten membutuhkan pendekatan yang lebih integratif dalam mengatasi kemiskinan, terutama melalui perbaikan kualitas pendidikan, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Salah satu kendala utama dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional adalah tingginya tingkat pengangguran yang perlu diatasi. Pengangguran berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat yang menganggur kehilangan mata pencaharian tetap, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Dampak ini juga terlihat pada skala ekonomi makro, di mana tingkat pengangguran yang tinggi menekan daya beli dan produktivitas tenaga kerja masyarakat, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Cards, 1995). Kehilangan

penghasilan tetap membuat banyak orang sulit memenuhi kebutuhan dasar, menurunkan kualitas hidup, dan memperbesar risiko jatuh ke dalam kemiskinan.

Pengangguran adalah kondisi saat seseorang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan (Hariyanto, 2021). Masalah pengangguran masih menjadi tantangan di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Meskipun daerah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan UMKM, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya keterampilan dan pendidikan, sehingga banyak orang kesulitan bersaing dalam dunia kerja. Selain itu, kurangnya pelatihan kerja, minimnya informasi lowongan pekerjaan, dan terbatasnya lapangan kerja juga menjadi hambatan. Banyak lulusan sekolah tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, banyak warga usia produktif tidak bekerja dan akhirnya menambah angka kemiskinan. Data dari BPS menunjukkan bahwasanya penurunan kemiskinan tidak selalu diikuti dengan peningkatan jumlah pekerjaan

**Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klaten**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2018-2022 (Data Diolah)

Kabupaten Klaten di Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi besar dengan populasi lebih dari 1,3 juta jiwa. Potensi ini seharusnya menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, realitas menunjukkan bahwasanya potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, sebagaimana terlihat dari fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten naik dari 3,14% pada 2018 menjadi 3,54% pada 2019. Dampak pandemi covid-19 menyebabkan lonjakan TPT pada 2020 menjadi 5,46%, dan sedikit naik menjadi 5,48% pada 2021. Meskipun terjadi penurunan pada 2022 menjadi 4,31%, jumlah pengangguran tetap tinggi, yaitu lebih dari 28 ribu jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan penciptaan lapangan kerja bagi jumlah angkatan kerja yang terus meningkat.

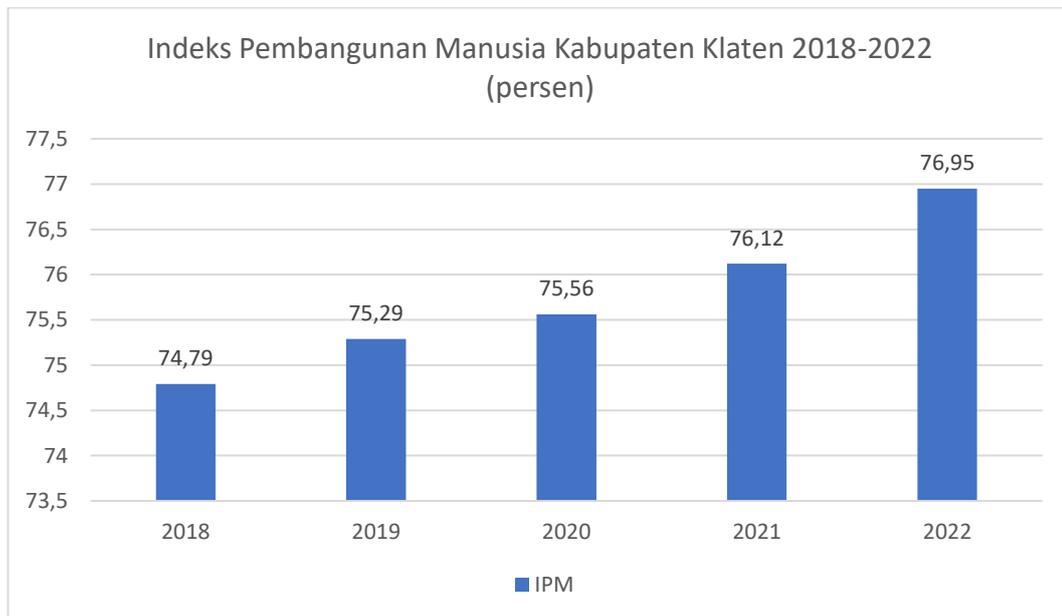
Tingkat serapan tenaga kerja yang rendah di Kabupaten Klaten tidak terlepas dari berbagai kendala struktural yang menghambat dinamika ketenagakerjaan. Di antaranya adalah keterbatasan kapasitas sektor industri dalam menampung angkatan kerja, disparitas antara kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja dan kebutuhan riil pasar kerja, serta belum optimalnya pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi produktif secara berkelanjutan. Jika kondisi ini tidak segera diatasi dengan kebijakan yang tepat, maka tingginya angka pengangguran berisiko memperburuk

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk penurunan daya beli dan peningkatan beban ekonomi rumah tangga.

Pemulihan ekonomi pasca-pandemi memang menunjukkan beberapa kemajuan, seperti kembalinya aktivitas sektor-sektor ekonomi, kebijakan stimulus pemerintah, dan peningkatan investasi infrastruktur. Selain itu, program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja juga mulai memberikan dampak positif terhadap kesiapan angkatan kerja dalam menghadapi kebutuhan industri. Namun demikian, pemulihan ini belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat yang paling terdampak secara sosial dan ekonomi.

Pengangguran yang tinggi tidak hanya berimplikasi pada stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup tidak hanya rendahnya pendapatan, tetapi juga ketimpangan sosial dan keterpinggiran dalam akses terhadap layanan dasar (Hasanah et al., 2021). Menurut Wati (2023) pengangguran yang terus bertahan dalam angka tinggi dapat memperburuk kesenjangan pendapatan dan meningkatkan risiko kemiskinan jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong inklusi ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Memberikan akses yang setara terhadap peluang ekonomi akan menjadi kunci dalam meminimalkan kesenjangan sosial dan mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan..

**Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2018-2022 (Data Diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai barometer fundamental dalam menakar capaian pembangunan suatu wilayah, dengan menitikberatkan pada tiga pilar esensial: mutu pendidikan, derajat kesehatan, serta kelayakan standar hidup. Merujuk pada data visual dalam Gambar 1.3, terlihat bahwasanya IPM Kabupaten Klaten mengalami tren akseleratif, dari angka 74,79 pada tahun 2018 menjadi 76,95 pada tahun 2022. Kenaikan tersebut merefleksikan adanya transformasi positif dalam kualitas hidup masyarakat, yang terwujud melalui peningkatan akses dan mutu di bidang pendidikan, kesehatan, serta kapasitas daya beli masyarakat.

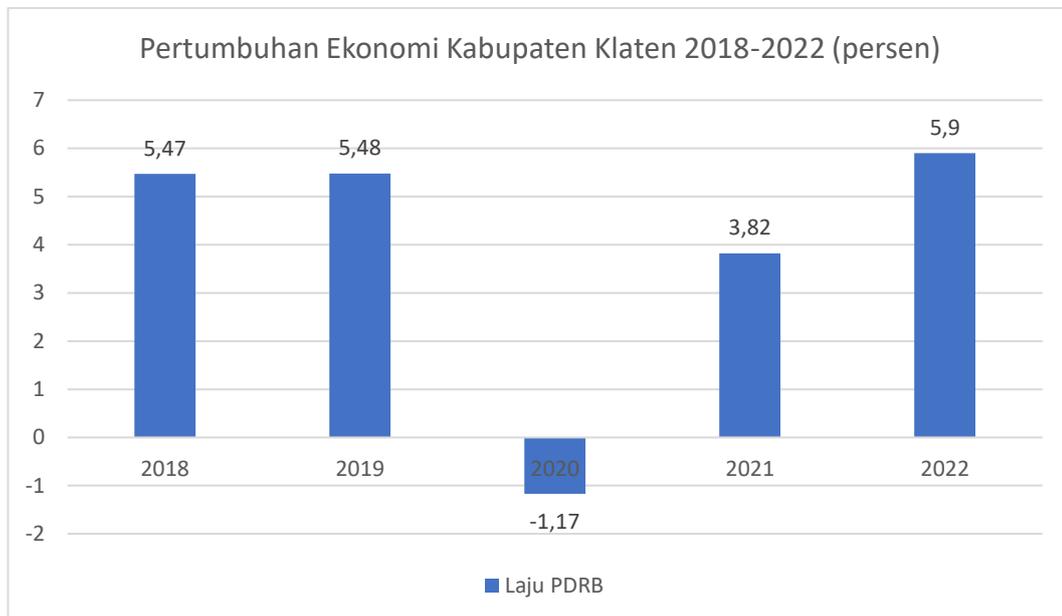
Peningkatan nilai IPM tersebut tidak serta merta mencerminkan perbaikan kondisi sosial-ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Realitas di lapangan masih menunjukkan bahwasanya sebagian penduduk mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang layak, khususnya di daerah

pinggiran seperti Kecamatan Kemalang. Di samping itu, ketersediaan lapangan kerja yang belum mampu menampung angkatan kerja usia produktif secara optimal juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Di sektor ekonomi, sebagian masyarakat masih mengandalkan sektor informal dan pertanian yang memiliki tingkat produktivitas relatif rendah, sehingga berdampak pada ketidakstabilan pendapatan dan keterbatasan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Situasi ini semakin diuji pada tahun 2020 ketika terjadi tekanan akibat pandemi, yang tidak hanya memengaruhi aspek kesehatan, tetapi juga menurunkan aktivitas ekonomi dan pendidikan. Meskipun demikian, IPM Klaten tetap menunjukkan peningkatan dari 75,29 pada tahun 2019 menjadi 75,56 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan layanan dasar di tengah kondisi krisis. Setelah pandemi mulai mereda, perbaikan IPM semakin terlihat pada tahun 2021 dan 2022, yang menunjukkan bahwasanya proses pemulihan berjalan cukup baik.

Peningkatan IPM ini memiliki keterkaitan erat dengan dinamika tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten. Secara konseptual, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan membuka akses lebih luas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, IPM tidak hanya menjadi cerminan keberhasilan pembangunan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam menilai efektivitas program pengentasan kemiskinan (Hakim, 2024).

**Gambar 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2018-2022 (Data Diolah)

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keberhasilan pembangunan, yang salah satunya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama kinerja ekonomi wilayah. Di Kabupaten Klaten, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan fluktuasi selama 2018–2022. Setelah tumbuh stabil di angka 5,47% (2018) dan 5,48% (2019), terjadi kontraksi -1,17% pada 2020 akibat pandemi, lalu pulih menjadi 3,82% (2021) dan 5,90% (2022). Fluktuasi ini menunjukkan bahwasanya meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, penurunan kemiskinan tidak terjadi secara konsisten.

Fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi ini berimplikasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat kemiskinan. Penelitian oleh Wati (2018) menemukan bahwasanya penumbuhan tingkat PDRB di Jawa Tengah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mana kenaikan 1%

PDRB mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,444%. Namun, penelitian lain oleh Valiant Kevin et al. (2022) menunjukkan bahwasanya pada periode 2013–2021, meskipun PDRB berpengaruh negatif, pengaruh tersebut tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif, namun belum diikuti oleh pengurangan angka kemiskinan yang signifikan. Fenomena ini disebabkan karena sektor-sektor penyumbang utama pertumbuhan, seperti industri pengolahan dan konstruksi, belum sepenuhnya melibatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi masih belum merata, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan pertanian tradisional yang masih menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga miskin di Klaten. Meskipun pendapatan daerah meningkat, kelompok masyarakat rentan masih mengalami keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi yang lebih produktif. Hal ini tercermin dari data tingkat kemiskinan yang menunjukkan bahwasanya sebagian masyarakat belum mampu keluar dari jerat kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Selain itu, daya beli masyarakat belum mengalami perbaikan yang signifikan, mengingat tekanan inflasi serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang masih menjadi tantangan di Klaten.

Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi di Klaten bersifat positif, hal tersebut tidak otomatis menurunkan angka kemiskinan apabila tidak diiringi dengan pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Marfuah et al. (2019) yang menyebutkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berdampak pada kesejahteraan seluruh

masyarakat apabila distribusi pendapatannya tidak merata. Peningkatan PDRB cenderung berasal dari sektor padat modal yang minim menyerap tenaga kerja lokal, sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Andhykha et al. (2018) juga menegaskan bahwasanya meskipun PDRB meningkat, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada pemerataan pendapatan di masyarakat.

Kabupaten Klaten secara struktural masih mengalami transisi ekonomi yang didominasi oleh sektor informal dan pertanian, kelompok rentan belum sepenuhnya dapat mengakses manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut (Ferdiansyah & Panjaitan, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya menargetkan peningkatan angka PDRB secara makro, tetapi juga menasar aspek pemerataan hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten. Wilayah ini dipilih karena mencerminkan karakteristik ekonomi daerah dengan dominasi sektor pertanian dan sektor informal, yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Meskipun Klaten mencatatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, hal tersebut belum serta-merta berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwasanya sebagian masyarakat di Klaten masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan mengeksplorasi keterkaitan antara variabel-variabel tersebut, kajian ini berpotensi menyediakan kontribusi pada merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi

indikator makro, melainkan juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat kelas bawah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian konstruksi argumentative yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, di antaranya:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kabupaten Klaten?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan dalam memengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Klaten?
3. Sejauh mana pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menimbang elaborasi latar belakang serta formulasi permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka arah fundamental dari penelitian ini diarahkan untuk merealisasikan sejumlah tujuan substantif sebagaimana dirancang dalam kerangka konseptual kajian ini, di antaranya:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten.
3. Untuk menganalisis serta mengidentifikasi sejauh mana pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten.

## 1.4 Ruang Lingkup

Kajian ini secara eksplisit dibatasi dalam koridor pendekatan kuantitatif, dengan fokus utama untuk mengeksplorasi pengaruh variabel-variabel makroekonomi—yakni tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi—terhadap dinamika tingkat kemiskinan di wilayah administratif Kabupaten Klaten. Populasi penelitian merujuk pada masyarakat Kabupaten Klaten, dengan pengambilan sampel berbasis data sekunder yang bersumber dari institusi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait lainnya. Jangka waktu pengamatan dibentangkan selama 18 tahun, dari 2007 hingga 2024, guna menyuguhkan representasi longitudinal yang utuh atas fluktuasi kemiskinan di daerah tersebut. Tujuan akhir dari riset ini adalah untuk mengonstruksi pemahaman yang mendalam serta sistematis mengenai interrelasi antara indikator-indikator pembangunan yang dianalisis.

Rancangan teoretis dalam penelitian ini berakar pada kerangka relasi kausal antara konstruk-konstruk variabel bebas dan variabel terikat. Tiga variabel bebas yang dikaji secara mendalam mencakup tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta laju pertumbuhan ekonomi. Ketiganya diposisikan sebagai determinan struktural yang berpotensi memengaruhi dinamika variabel terikat, yakni tingkat kemiskinan, yang dalam konteks ini diperlakukan sebagai representasi kondisi kesejahteraan sosial-ekonomi suatu wilayah. Dalam penelitian ini digunakan metode regresi linear berganda untuk menguji hipotesis, baik secara parsial maupun simultan, guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan mengkaji masalah ini, diharapkan penelitian dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan wawasan baru

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan temuan dari penelitian ini mampu memperkaya literatur akademik di bidang ekonomi pembangunan, sekaligus menjadi landasan bagi kajian terkait dengan isu kemiskinan dan determinannya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Pertama, bagi kalangan peneliti, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wawasan mengenai permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor penentunya di Kabupaten Klaten. Kedua, bagi lingkungan akademik, khususnya program studi terkait, temuan penelitian ini berpotensi menjadi fondasi fundamental dalam pengembangan studi lanjutan mengenai isu serupa. Ketiga, bagi pihak pemerintah, penelitian ini memberikan dasar empiris yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan kontekstual.

#### **3. Manfaat Kebijakan**

Kajian ini memiliki potensi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi penanggulangan kemiskinan berdasarkan pemahaman terhadap hubungan antarvariabel yang diteliti.